

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Politik Globalisasi dimaknai sebagai kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan situasi global, yang ditandai dengan adanya liberalisasi ekonomi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara agar biaya produksi lebih rendah karena upah buruh yang rendah pula.<sup>1</sup> Liberalisasi ekonomi merupakan sistem ekonomi yang menempatkan individu sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi domestik atau internasional.<sup>2</sup> Indonesia merupakan contoh salah satu negara berkembang yang menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi.

Praktik liberalisasi ekonomi dimulai sejak tahun 1983 ketika terjadi deregulasi perbankan yakni perubahan kebijakan sistem perbankan Indonesia sebagai tonggak awal sistem pasar bebas perbankan nasional,<sup>3</sup> disusul pada tahun 1989 Indonesia bergabung dengan APEC. APEC (*Asia- Pacific Economic Cooperation*) merupakan forum kerjasama antar 21 negara yang saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bersifat non-politis di kawasan Asia

---

<sup>1</sup> Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional- Konsep & Teori* (Jilid I), Bandung : PT Refika Aditama hal. 192.

<sup>2</sup> Mohtar mas'ood, 2003, *Ekonom-Politik Internasional dan Pembangunan* (ed..2), Yogyakarta : Pustaka Pelajar hal. 97.

<sup>3</sup> Aliasudin, *Deregulasi Perbankan Dan Kestabilan Permintaan Uang Di Indonesia* dalam Jurnal Managament dan Pembangunan, Vol 1, No. 2 , 2002, Banda Aceh : Fakultas Ekonomi Syiah Kuala.

Pasifik.<sup>4</sup> Indonesia juga bergabung dalam organisasi perdagangan bebas dunia WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1995. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah resmi memasuki era liberalisasi ekonomi hingga sekarang.<sup>5</sup>

Pembukaan kawasan industri di berbagai wilayah di Indonesia merupakan bukti bahwa pemerintah telah menerapkan liberalisasi ekonomi. Masuknya investasi asing berupa keberadaan perusahaan multinasional dianggap sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat memperluas kapasitas produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Lebih jauh, investasi perusahaan multinasional juga berpengaruh positif terhadap situasi ekonomi negara tujuan terutama menambah penghasilan pajak daerah, mengurangi pengangguran dan menyebarkan teknologi serta pengetahuan baru.<sup>6</sup>

Beberapa negara di benua Asia telah membuka wilayahnya sebagai kawasan industri untuk menumbuhkan perekonomian negaranya seperti negara China, Thailand, Malaysia. China membuka kawasan industri di provinsi Lioing seluas 75,000-sq-km yang bergerak pada sektor jasa, manufaktur, pertambangan dan lain-lain.<sup>7</sup> Keberadaan kawasan industri di provinsi Lioing mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 24 juta orang. China memiliki pertumbuhan ekonomi paling cepat di Asia dengan GDP US\$ 340636.8.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Asian-Pacific Economic Cooperations (APEC), Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia diakses dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/APEC.aspx> (28/10/2016, 18: 39 WIB)

<sup>5</sup> Hata S , 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO : Aspek- aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal 211.

<sup>6</sup> Stephen D. Cohen, 2007, *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment*, New York : Oxford University Press.Inc, hal 191.

<sup>7</sup> Budi Winarno, 2009, *Pertarungan Negara vs Pasar*, Yogyakarta : Media Pressindo hal. 202

<sup>8</sup> National Data, 2014 National Berau of Statistics of China, dalam [www.stats.gov.cn/english](http://www.stats.gov.cn/english) (23/10/2016 pukul 14:25 WIB )

Selain itu, Negara Thailand juga membuka wilayah industri di Bangkok distrik Khlong Luang, Phatum Thani sebagai kawasan industri yang bergerak di sektor otomotif dan pengembangan teknologi (*gadget*) serta perakitan onderdil kendaraan.<sup>9</sup> Kawasan industri ini menyerap banyak tenaga kerja dan turut berkontribusi terhadap perekonomian Thailand yang mencapai GDP per kapita sebesar US\$ 5,736.9.<sup>10</sup>

Malaysia juga membuka kawasan industri di daerah Johor sebagai kawasan industri yang bergerak pada sektor perakitan mobil, produksi ban dan barang-barang dari plastik.<sup>11</sup> Keberadaan kawasan industri di daerah Johor mampu memaksimalkan hasil karet sebagai komoditi ekspor berupa produk ban. Malaysia memiliki pencapaian GDP per kapita (US\$) 9,656.8.<sup>12</sup>

Sementara, keputusan pemerintah Indonesia terkait investasi asing tertuang dalam UU RI Nomor 25 tahun 2007 yang diimplementasikan hingga level pemerintah daerah. Memuat hak dan kewajiban perusahaan penanaman modal terhadap negara dan sebaliknya. Perusahaan penanaman modal memiliki kewajiban harus mengutamakan warga negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan wajib meningkatkan kompetisi tenaga kerja melalui

---

<sup>9</sup> *Kawasan Industri Thailand di evakuasi dalam* [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/10/111017\\_thaifloods.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/10/111017_thaifloods.shtml) (18/03/2016 pukul 17 : 58 WIB)

<sup>10</sup> *Asean Statistical Leaflet selected key indicators 2016* , ASEAN : one vision one identity one community diakses dalam <http://asean.org/asean/asean-secretariat/> (23/10/2016 , 14:00 WIB).

<sup>11</sup> *Budi Winarno, Op.cit.hal. 212.*

<sup>12</sup> *Asean Statistical Leaflet selected key indicators 2016* , ASEAN : one vision one identity one community, Op.cit

pelatihan dan alih teknologi. Perusahaan penanaman modal memperoleh kepastian hak, hukum dan perlindungan dari negara.<sup>13</sup>

Indonesia membuka kawasan industri di beberapa wilayah salah satunya di provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak kawasan industri di daerahnya hingga mampu menjadi provinsi dengan GDP terbesar ke 2 di Indonesia. Beberapa daerah di provinsi Jawa Timur yang telah membuka wilayahnya sebagai kawasan industri yaitu kabupaten Gresik, Pasuruan, Surabaya, Kediri, Probolinggo, Mojokerto, Sidoarjo dan lain - lain. Nama- nama daerah tersebut telah masuk dalam daftar 10 tingkat pendapatan/ UMK tertinggi di provinsi Jawa Timur tahun 2015 dengan posisi :

- 1). Kota Surabaya dengan UMK Rp. 2.710.000.
- 2). Kabupaten Gresik dengan UMK Rp. 2.707.500.
- 3). Kabupaten Sidoarjo dengan UMK Rp. 2.705.000.
- 4). Kabupaten Pasuruan dengan UMK Rp. 2.700.000.
- 5). Kabupaten Mojokerto dengan UMK Rp. 2.695.000.
- 6). Kabupaten Malang dengan UMK Rp. 1.962.000.
- 7). Kota Malang dengan UMK 1.882.250.
- 8). Kota Batu dengan UMK Rp.1.817.000.
- 9). Kabupaten Jombang dengan UMK Rp. 1.725.000. dan Kabupaten Tuban dengan UMK Rp. 1.575.000.<sup>14</sup>

Penelitian ini akan menganalisis pengembangan kawasan industri di Bojonegoro dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi daerah. Awal tahun 2015 daerah Bojonegoro memperoleh investor asal negara China. Proses awal

---

<sup>13</sup>Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007, Bank Indonesia, diakses dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (23/10/2016, 13:35 WIB)

<sup>14</sup>Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, diakses dalam [http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb\\_dl=13695](http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=13695) (05/12/2015, 08.12 WIB)

kerjasama dilakukan pertemuan antara pimpinan perusahaan PT. Shou Fong Lastindo dengan Suyoto selaku bupati Bojonegoro kemudian diikuti hasil kesepakatan berupa berdirinya pabrik PT. Shou Fong Lastindo di tengah pedesaan tepatnya Desa Bakung, Kecamatan Kanor. Perusahaan di bidang produksi sepatu ini telah mempekerjakan 130 tenaga kerja perempuan Desa Bakung. Secara resmi PT. Shou Fong Lastindo mulai beroperasi Senin 16 November 2015.<sup>15</sup> Selain investasi asing dari negara China terdapat investasi asing dari negara Korea Selatan yang dalam tahap pembicaraan antara bupati Bojonegoro dengan investor Korea Selatan.<sup>16</sup>

Sejak 2015 hingga 2016 kabupaten Bojonegoro sedikit demi sedikit berubah menjadi kawasan yang ramai investasi asing. Perubahan kondisi ekonomi di Bojonegoro diyakini peneliti karena keberhasilan pemerintah Bojonegoro dalam menarik investasi asing. Mengingat wilayah kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang sebelumnya tidak mengenal sektor industri asing non migas di kawasannya masa pemerintahan Santoso hingga periode pertama masa kepemimpinan Suyoto. Dapat dikatakan wilayah Bojonegoro berada dalam kondisi “kota mati” karena secara geografis letak kabupaten Bojonegoro masih di dominasi oleh pedesaan dengan kontur tanah labil (tanah gerak), jauh dari akses jalan raya provinsi serta akses pelabuhan masih kurang mendukung. Sedangkan

---

<sup>15</sup> *Perusahaan Sepatu Kanor Mulai beroperasi* dalam <http://beritabojonegoro.com/read/2985-pabrik-sepatu-di-kanor-mulai-beroperasi.html> (23/03/2016, 04:45 WIB)

<sup>16</sup> *Pengusaha Korea Selatan Tertarik Berinvestasi di kabupaten Bojonegoro* dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/06/090793730/pengusaha-korea-selatan-tertarik-berinvestasi-di-bojonegoro> (18/10/2016, 09:00 WIB).

dari faktor sumber daya manusia kualitas masyarakat Bojonegoro masih terbilang rendah.<sup>17</sup>

Hal ini menarik untuk dikaji karena di tengah tantangan-tantangan infrastruktur dan kondisi geografis, kabupaten Bojonegoro justru mengalami perubahan kondisi ekonomi sebanyak 62,32 % nilai tambah yang terbentuk pada kategori industri non- migas dengan masuknya investasi asing oleh karena itu peneliti ingin mengangkat fenomena ini untuk dikaji lebih dalam mengenai upaya pemerintah daerah Bojonegoro dalam menarik investasi asing di sektor industri non migas di tengah tantangan-tantangan infrastruktur dan kondisi geografis kabupaten Bojonegoro.<sup>18</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan yang peneliti ajukan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Bojonegoro Dalam Menarik Investasi Asing di Sektor Industri Non- Migas Tahun 2013- 2016 ?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui gambaran umum kondisi pemerintahan Bojonegoro dan upaya pemerintah Bojonegoro dalam menarik investasi asing di sektor industri non migas di kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>17</sup> Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro dalam <http://www.bojonegoro.go.id/geografi> (12/02/2016, 19:38 WIB).

<sup>18</sup> Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, <https://bojonegorokab.bps.go.id>, (28/11/2016,19:26 WIB)

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat akademis**

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan akan memberi pengetahuan baru terhadap isu ekonomi domestik yang ternyata juga dipengaruhi dengan iklim ekonomi internasional sehingga aplikasi pengembangan teoritis dalam menjawab maupun menguji akan terlihat nyata dan relevansinya seiring dengan perkembangan zaman.

#### **b) Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberi pengetahuan mengenai aspek- aspek yang menjadi daya tarik terhadap masuknya investasi asing di tengah kondisi infrastruktur dan geografis kabupaten Bojonegoro tidak mendukung sebagai kawasan industri atau dalam keadaan “kotamati”.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Untuk dapat mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan Bojonegoro sebagai tujuan investasi asing ditengah tantangan infrastruktur dan geografis, disini penulis menggunakan beberapa rujukan penelitian sebagai studi literature, yaitu:

Pertama, jurnal penelitian oleh Muhammad Nasir Badu tentang “*Internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat (Studi Kasus Investasi Asing di*

*Sulawesi Barat*)”.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Sulawesi Barat menjual potensi lokal ke pasar internasional untuk menarik investasi asing. Daerah-Daerah di Indonesia harus menciptakan iklim yang kondusif dalam menarik investasi asing supaya ikut berperan dalam memacu pembangunan daerah yang secara akumulasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak daerah yang memberi respon baik dalam mendukung terciptanya iklim investasi asing ini, salah satunya adalah pemerintah daerah provinsi Sulawesi Barat yang mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai strategi menarik investasi asing.

Penelitian ini menggunakan konsep *Multinational Cooperation* oleh Walter S. Jones, Reilly dan Brown. Keberadaan investasi asing dianggap mampu mempercepat pembangunan ekonomi daerah hingga nasional, serta mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi, geografis dan psikologis. Dengan jenis penelitian analisis Deskriptif- Kualitatif, untuk mempelajari lebih rinci hasil data empiris dari unit analisa penelitian.

Pada penelitian ini, terdapat persamaan tujuan oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat dan objek penelitian penulis (pemerintah daerah Bojonegoro) yaitu upaya menciptakan iklim yang kondusif dalam menarik investasi asing guna mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Sedangkan perbedaan antara penelitian Muhammad Nasir Badu dengan penelitian penulis terletak pada

---

<sup>19</sup> Muhammad Nasir Badu, *Internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat : Investasi Asing di Sulawesi Barat*, Jurnal Politik Provetik, Vol, 3, No, 1 (Tahun 2014), Universitas Hasanudin.



kondisi geografis dan infrastruktur. Sulawesi Barat memiliki infrastruktur yang mendukung sebagai kawasan industri, sedangkan Bojonegoro merupakan kawasan yang masih minim infrastruktur dan kondisi geografis yang didominasi oleh pedesaan dengan kontur tanah gerak.

Kedua, penelitian yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah Jurnal Laode Muhamad Fatun, dalam jurnal tersebut penulis membahas mengenai agenda liberalisasi ekonomi yang telah masuk di Negara Indonesia turut melahirkan kebijakan tata kelola pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik melalui lahirnya undang- undang otonomi daerah, hal ini membuka peran pemerintah daerah lebih luas dan bebas dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerahnya masing- masing dengan melihat sejumlah potensi daerah yang dimiliki. Peran pemerintah daerah tidak hanya sebagai aktor lokal saja melainkan juga menjadi aktor internasional “paradiplomasi”, salah satu implementasinya misalkan melakukan kerjasama investasi asing.

Pemerintah kota Makassar menerapkan praktik paradiplomasi untuk menarik investasi asing di kawasannya, komitmen pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan pembangunan cukup tinggi. Terbukti dari kerjasama walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomantho dengan *Chief Eksekutif Microsoft* dalam membangun dan mengintegrasikan makasar dengan daerah lain dalam bentuk *smart city*.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah kota Makassar karena pemerintah kota Makassar percaya jika langkah ini merupakan strategi yang dapat mendukung Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia, ketersediaan infrastruktur ini

nantinya juga akan menarik lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia khususnya kota Makasar. Persamaan dari penelitian ini dapat dilihat dari strategi pemerintah daerah yang berupaya untuk menarik investasi asing sebagai jalan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kedepannya. Pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung akan memberi keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan penelitian ini terletak pada arah investasi asing, pemerintah kota Makasar mengarahkan investasi asing ke pembangunan infrastruktur sedangkan pemerintah Bojonegoro lebih mengarah pada investasi asing ke kawasan industri non-migas.

Ketiga, skripsi dari Farden Atus Murib dengan judul *Pengaruh Pengembangan Investasi Asing di Raja Ampat terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Papua*.<sup>20</sup> Dalam penelitiannya, Farden Atus Murib menjelaskan bahwa keberadaan investor asing di Raja Ampat telah membantu Indonesia dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan kehadiran investasi asing juga telah mempromosikan pariwisata di Raja Ampat sebagai objek wisata Indonesia yang mampu bersaing di kancah internasional. Tetapi keberadaan Investasi tersebut pada kenyataannya dapat mengubah kontrol negara, dan berdampak pada ketergantungan atas investor asing, bahkan sarana-sarana produksi mampu dikuasai dan dikelola oleh investor asing.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *foreign Direct Investment (FDI) Theory*, dimana FDI ini tidak hanya mencakup transfer kepemilikan, tetapi memungkinkan investor asing untuk mempelajari kontrol dari

---

<sup>20</sup> Farden Atus Murib, 2015, *Pengaruh Pengembangan Investasi Asing di Raja Ampat terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Papua*, Skripsi, Malang : Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

perusahaan dalam negeri, dengan demikian para investor asing mampu mempelajari mekanisme pemerintah di Raja Ampat dan Indonesia pada umumnya. Dalam skripsinya, Farden Atus Murib juga menggunakan *social empowerment Concept*, konsep ini memaparkan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara sehingga rakyat, organisasi, komunitas dapat diarahkan untuk mampu menguasai kehidupannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah Papua memberikan kebebasan kepada masyarakat, untuk mampu menguasai kehidupan dan merasakan kesejahteraan sosial seutuhnya.

Penelitian ini dijadikan studi literatur oleh penulis, karena adanya persamaan terkait strategi pemerintah daerah dalam konteks menarik investasi asing yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan persamaan konsep FDI yang digunakan. Sedangkan yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada aspek lokasi, teori *social empowerment* dan sektor yang menjadi daya tarik investasi asing.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yulyan Maharta Sayiar tentang “*Daya Tarik Indonesia terhadap Masuknya Investasi Asing : Peningkatan Investasi Jepang Terhadap Sektor Industri Indonesia*”<sup>21</sup> penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tarik negara Indonesia dalam menarik minat asing atau negara pendonor untuk berinvestasi.

Pemahaman terhadap istilah investasi asing dalam perdagangan internasional adalah *Foreign Direct Investment*. Teori yang digunakan untuk mengkerangkai *Foreign Direct Investment* dalam penelitian ini yaitu teori *Cycle*

---

<sup>21</sup> Yulyan Maharta Saviar, *Daya Tarik Indonesia Terhadap Masuknya Investasi Asing : Peningkatan Investasi Jepang Terhadap Sektor Industri Indonesia*, Surabaya : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.

*Product* Raymond Vernon, teori *Market Imperfections*, dan teori *Market Power*.

Ketiga teori tersebut pada dasarnya melihat alasan negara melakukan ekspansi pasar keluar negeri melalui *Foreign Direct Investment*, namun secara tidak langsung ketiga teori tersebut mampu melihat potensi suatu negara yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan multinasional. Pada akhirnya potensi yang dimiliki negara mampu menjadi daya tarik bagi pelaku investasi asing.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berkaitan dengan masuknya investasi asing di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Penelitian Yulyan Maharta Sayiar dengan penelitian penulis memiliki perbedaan pada pola objek penelitian dan teori / konsep yang digunakan. Penelitian Yulyan Maharta Sayiar negara yang bertindak sebagai hasil daya tarik investasi asing terhadap Indonesia yaitu negara Jepang dan penerima investasi yaitu negara Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis pelaku investasi asing di lakukan oleh berbagai negara dengan penerima investasi asing yang lebih spesifik yaitu kabupaten Bojonegoro.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil
	Muhammad Nasir Badu 2014	Internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat (Studi Kasus Investasi Asing di	Analisis Deskriptif-Kualitatif menggunakan konsep <i>Multinational Cooperation</i> oleh Walter S.	Persamaan tujuan oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat dan pemerintah daerah Bojonegoro yaitu upaya menciptakan iklim yang kondusif dalam menarik investasi asing guna mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Sedangkan

		Sulawesi Barat)	Jones, Reilly dan Brown	perbedaan terletak pada kondisi geografis dan infrastruktur, Sulawesi Barat memiliki infrastruktur yang mendukung sebagai kawasan industri sedangkan Bojonegoro merupakan kawasan yang masih minim infrastruktur dan kondisi geografis yang didominasi oleh pedesaan dengan kontur tanah gerak
	Laode Muhamad Fatun, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Paradiplomasi Menuju Kota Dunia : Studi Kasus Pemerintah Kota Makasar.	Deskriptif dengan menggunakan analisa paradiplomasi dalam kerangka otonomi daerah.	Persamaan dari penelitian ini dapat dilihat dari strategi pemerintah daerah yang berupaya untuk menarik investasi asing sebagai jalan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kedepannya. Pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung akan memberi keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan penelitian ini terletak pada arah investasi asing, pemerintah kota Makasar mengarahkan investasi asing ke pembangunan infrastruktur sedangkan pemerintah Bojonegoro lebih mengarah pada investasi asing ke kawasan industri non-migas.
	Farden Atus Murib, 2015, Universitas Muhammadiyah	Pengaruh Pengembangan Investasi Asing di Raja Ampat terhadap Pembangunan Ekonomi	Deskriptif menggunakan alat analisa <i>Foreign Direct Investment (FDI) Theory</i> dan <i>Social Empowerment</i>	Adanya persamaan terkait strategi pemerintah daerah dalam konteks menarik investasi asing yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Sedangkan yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada aspek lokasi dan sektor yang menjadi daya

	Malang	dan Sosial Masyarakat Papua.	<i>Concept.</i>	tarik investasi asing,.
	Yulyan Maharta Sayiar	Daya Tarik Indonesia terhadap Masuknya Investasi Asing : Peningkatan Investasi Jepang Terhadap Sektor Industri Indonesia	Eksplanatif menggunakan alat analisa teori <i>Cycle Product</i> Raymond Vernon, teori <i>Market Imperfections</i> , teori <i>Market Power</i> .	Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berkaitan dengan masuknya investasi asing di Indonesia. Penelitian Yulyan Maharta Sayiar dengan penelitian peneliti memiliki perbedaan pada subjek penelitian, dalam penelitian Yulyan Maharta Sayiar negara yang bertindak sebagai hasil daya tarik investasi asing terhadap Indonesia yaitu negara Jepang dengan penerima investasi yaitu negara Indonesia. Sedangkan dalam penelitian peneliti pelaku investasi asing masih bersifat umum di lakukan oleh berbagai negara dengan penerima investasi asing yang lebih spesifik yaitu kabupaten Bojonegoro.
	Wahyu Oktafia, 2016, Universitas Muhammadiyah Malang.	Upaya Pemerintah Daerah Bojonegoro Dalam Menarik Investasi Asing di Sektor Industri Non- Migas Tahun 2013- 2016	Deskriptif Menggunakan Konsep FDI sebagai stimulus Pembangunan dan Konsep Paradiplomasi oleh Panayotis Soldatos dan Ivo Duchacek	Melihat upaya pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro dalam menarik investasi asing di sektor industri non-migas tahun 2013-2016 untuk berinvestasi di daerah Bojonegoro .

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.4.1 Konsep Investasi Asing Sebagai Stimulus Pembangunan

Investasi asing memiliki pengertian sebagai bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing di suatu wilayah kawasan industri, baik menggunakan modal asing secara keseluruhan maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>22</sup> Menurut Todaro investasi asing atau *Foreign Direct Investment* merupakan bentuk investasi asing baik berupa penanaman modal maupun pendirian lokasi industri di suatu kawasan. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 7 investasi asing merupakan penanaman modal untuk melakukan usaha di suatu wilayah Indonesia.<sup>23</sup>

Robert Gilpins dalam bukunya yang berjudul *Global Political Economy : Understanding the International Economic Order* menekankan sebagai berikut : *An economist might argue that FDI is an indirect route to economic specialization based on the distribution of productive factor.*<sup>24</sup> Gilpin mengemukakan jika investasi asing merupakan cara paling efektif yang bisa dilakukan negara untuk meningkatkan perekonomiannya.<sup>25</sup> Negara melalui keberadaan investasi asing memperoleh dampak positif berupa meningkatnya pendapatan devisa negara, perluasan tenaga kerja, transfer teknologi dan

---

<sup>22</sup> Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007, Bank Indonesia, diakses dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (23/10/2016, 13:35 WIB).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir (1)

<sup>24</sup> Robert Gilpins, 2002. *Global Political Economy : Understanding the Internastional Economic Orde*, New Jersey : Princeton University Press, hal. 278.

<sup>25</sup> *Ibid.*

bertambahnya pendapatan daerah. Investasi asing berkontribusi besar terhadap ke- empat komponen tersebut hingga mampu menjadi stimulus pembangunan.

Pertama, Devisa merupakan alat pembayaran yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri dan digunakan dalam kegiatan ekspor impor sewaktu transaksi perdagangan internasional.<sup>26</sup> Sesuai ketentuan UU RI nomor 24 tahun 1999 menyatakan bahwa devisa merupakan salah satu alat atau sumber pembiayaan yang penting bagi negara dan harus dipergunakan sebaik- baiknya untuk memperlancar lalu lintas perdagangan.<sup>27</sup> Tersedianya produk substitusi impor di dalam negeri membantu negara mengurangi kegiatan impor produk sehingga meminimalisir penggunaan devisa dan memaksimalkan perolehan devisa melalui ekspor produk.

Kedua, perluasan tenaga kerja. Kapasitas produksi barang yang tinggi dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional mengakibatkan perusahaan multinasional lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dibandingkan perusahaan dalam negeri.<sup>28</sup> Melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi oleh perusahaan multinasional akan mampu menghidupkan sektor jasa (keuangan, jasa kesehatan, usaha perbaikan, dan pemasaran) sehingga menstimulus pertumbuhan ekonomi di negara berkembang lebih terjamin.<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan UU RI nomor 25 pasal 10 ayat 1 tahun 2007 yang mengatur tentang ketenagakerjaan dimana perusahaan penanam modal

---

<sup>26</sup> Arti kata devisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dalam <http://kbbi.web.id/devisa> (08/01/2016, 13: 35 WIB)

<sup>27</sup> Undang Undang RI nomor 24 tahun 1999, Bank Indonesia, diakses dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (23/10/2017, 13:25 WIB)

<sup>28</sup> Zakiati Silvia, 2016, *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja di Indonesia*, Skripsi, Padang : Jurusan Ekonomi, Universitas Andalas, hal. 2.

<sup>29</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, Yogyakarta : Kanisius, hal.146.



harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja.<sup>30</sup>

Ketiga, keberadaan investasi asing melalui penanaman modal langsung akan memberikan injeksi teknologi produksi yang dikemudian hari dapat di alihkan pada mitra- mitra usaha di dalam negeri, melalui program- program latihan dan proses belajar sambil bekerja sesuai UU RI nomor 25 pasal 10 ayat 3 tahun 2007.<sup>31</sup> Keberadaan Investasi asing akan mendorong *economic growth* yakni mendorong ekspor non migas untuk meningkatkan devisa, dan pengembangan industri substitusi impor yang dapat menghemat devisa. Hal ini dikarenakan investasi asing dinilai memiliki aliran modal yang relative stabil dan berjangka panjang.

Kelima adalah pendapatan daerah. Sejak tahun 1999 Indonesia menerapkan otonomi daerah ditandai dengan lahirnya UU RI nomor 22 tahun 1999 dan mengalami pembaruan tahun 2004 yang mengatur tata kelola otonomi daerah yang mengenai setiap daerah dalam menjalankan pemerintahannya harus di dukung oleh sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah. Masuknya investasi asing akan memberi peningkatan nilai tambah ekonomi. Investasi asing akan memberi dampak positif pada besaran balas jasa faktor- faktor produksi seperti : bentuk sewa tanah, upah, bunga dan keuntungan- keuntungan lain yang diperoleh melalui aktivitas produksi.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007, Bank Indonesia, diakses dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (23/10/2016, 13:35 WIB)

### 1.4.2 Konsep Paradiplomacy

Konsep paradiplomacy merupakan gagasan dari sebuah kajian yang relative baru dalam hubungan internasional.<sup>32</sup> Istilah paradiplomacy pertama kali dikemukakan oleh Panayotis Soldatos ilmuwan asal Bosque pada tahun 1980-an dalam perdebatan akademi.<sup>33</sup> *Paradiplomacy* merupakan hasil penggabungan dari *Parallel Diplomacy* atau yang menurut Ivo Duchacek yaitu *micro diplomacy*. Konsep ini mengacu pada makna *The Foreign Policy of Non-Central Government*.<sup>34</sup>

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak lepas dari adanya regulasi nasional yaitu adanya Undang- Undang otonomi daerah No.32 Tahun 2004 yang merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengajak setiap daerah di Indonesia mandiri dan bersifat kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya masing- masing.<sup>35</sup> Sedangkan *Paradiplomacy* menurut **Panayotis Soldatos** dan **Ivo Duchacek**, konsep diplomasi : “*Refers to direct international activity by sub national actors (federated units, regions, urban communities, cities) supporting, complementing, correcting, duplicating, or challenging the nation-states’ diplomacy*”<sup>36</sup>. Konsep ini melihat perilaku dan kapasitas *sub- state* secara spesifik (pemerintah regional atau Pemda)

---

<sup>32</sup> Manap, *Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Aktor Paradiplomasi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Aruk-Biawak*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses dalam <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39394.pdf> (04/06/2017,21:35 WIB)

<sup>33</sup> Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy : Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional*, The Politic : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Vol, 1 No, 1 ( January 2015) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>34</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press Yogyakarta, hal : 1-2.

<sup>35</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*, diakses dari [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), (12/01/2017, 18:33)

<sup>36</sup> Manap, *Op.Cit*.

dalam melakukan kerjasama dengan pihak asing dalam memenuhi kepentingan daerahnya.<sup>37</sup>

Paradiplomacy juga didefinisikan sebagai keterlibatan pemerintah sub-state dalam hubungan internasional, melalui pembentukan kontak permanen formal dan informal dengan lembaga public atau swasta asing dengan tujuan untuk mempromosikan ekonomi social, budaya atau masalah politik disetiap dimensi dengan pihak asing.<sup>38</sup> Sejak tahun 1990-an Ivo Duhacek telah mengamati jika kedepannya pemerintahan sub-state akan lebih berperan dalam hubungan internasional. Pemerintah subnasional akan menggunakan paradiplomacy sebagai alat dalam proses pengelolaan serta solusi dalam permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah pusat.<sup>39</sup>

Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan berupa asas desentralisasi sebagai implementasi hak pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya dan mengembangkan daerahnya sendiri. Pemerintah pusat mengindikasikan jika pemerintah daerah bebas melakukan aktifitas internasional salah satunya dengan menarik investasi asing untuk berinvestasi di daerah administrativnya.

---

<sup>37</sup> Manap, *Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Aktor Paradiplomasi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Aruk-Biawak*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses dalam <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39394.pdf> (04/06/2017,21:35 WIB)

<sup>38</sup> Harwanto dan Misrawati, *Regional Paradiplomacy Oleh Soldatos*, diakses dalam <http://respository.unand.ac.id/22305/3/bab/bab%201.pdf>

<sup>39</sup> *Ibid.*

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Metode / Tipe Penelitian**

Metode penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan suatu fenomena secara terperinci yang dipengaruhi oleh setting social dan situasi khusus, penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan ataupun menggambarkan fenomena yang diangkat oleh peneliti agar mengetahui adanya korelasi antara gejala satu dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data observasi, studi pustaka dan wawancara.<sup>40</sup>

### **1.6.2 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan pendekatan induktif. Diawali dari contoh konkrit atau fakta yang nyata di uraikan terlebih dahulu lalu membuat argument dasar sebagai jawaban sementara peneliti. Melalui penelitian empiris, hipotesis- hipotesis itu akan diuji untuk melihat kebenarannya sehingga bisa diakui sebagai fakta.

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.3.1 Batasan Materi**

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak keluar dari jalur penelitian maka peneliti hanya akan melakukan penelitian pada aspek upaya pemerintah daerah Bojonegoro dalam menarik investasi asing non-migas untuk berinvestasi di wilayah kabupaten Bojonegoro. Peneliti tidak

---

<sup>40</sup> Ulber Silalahi. 2009, *Metode Penelitian Social*, Bandung : Refika Aditama, hal.27.

mendalami tentang dampak spesifik yang telah dirasakan oleh pemerintah daerah Bojonegoro dari masuknya investasi asing non-migas.

#### **1.6.3.2 Batasan Waktu**

Dalam penelitian ini, peneliti membuat suatu batasan penelitian dari tahun 2013 – 2016 atau lebih tepatnya 3 tahun pertama pemerintahan bupati Suyoto sebagai bupati Bojonegoro di periode ke-2 (2013-2018) pemerintahannya. Peneliti akan menarik beberapa data dari pemerintahan sebelumnya sebagai dasar argumentasi peneliti periode tahun 2013- 2016.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian turun lapang yaitu mengambil data di instansi terkait serta melakukan beberapa wawancara dengan beberapa tokoh yang bersangkutan. Peneliti juga melakukan studi literature, yaitu mencari data yang berhubungan dengan objek penelitian melalui buku, website, jurnal dan lain lain yang telah diolah oleh orang lain.

### **1.7 Argumen Dasar**

Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Bojonegoro Menarik Investasi Asing di Sektor Industri Non- Migas Tahun 2013- 2016 dengan melakukan upaya kedalam yaitu melahirkan kebijakan- kebijakan yang meringankan investor asing dalam melakukan kegiatan investasi, seperti melahirkan regulasi tambahan (lokal) untuk mengatur dan meningkatkan minat investasi asing dalam berinvestasi di

wilayah kabupaten Bojonegoro dan melakukan upaya keluar yaitu melakukan promosi di berbagai event internasional.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

BAB I adalah sebagai acuan dasar bagi penulis untuk menentukan sejauh mana kasus yang akan diteliti. Batasan-batasan yang sudah jelas ditentukan dari segi waktu serta materi pembahasannya. Pada bab 1 berisi tentang latar belakang permasalahan utama yang menggambarkan studi yang akan dikaji, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu peneliti menggunakan beberapa referensi terdahulu untuk menjaga keaslian dan menghindari kesamaan penelitian dengan peneliti terdahulu. Peneliti juga menggunakan landasan konsep untuk menjawab permasalahan yang dikaji, teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dengan batasan waktu dan batasan materi. Penulis juga mencantumkan hipotesa awal sebagai bayangan hasil dari penelitian dan bagian akhir yaitu sistematika penelitian.

BAB II adalah pembahasan gambaran umum pemerintah Bojonegoro dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berisikan 2 sub bab. Sub bab pertama membahas profil dan gambaran ekonomi kabupaten Bojonegoro. Sub bab kedua menjelaskan pencapaian investasi asing non-migas baik investasi asing non-migas sebelum regulasi tambahan (2013) maupun setelah adanya regulasi tambahan (2013-2016).

BAB III berisikan pembahasan strategi kebijakan pengembangan industri di kabupaten Bojonegoro tahun 2013- 2016. Sub bab pertama akan membahas Regulasi pemerintah pusat dan daerah terkait investasi asing hingga pemerintah daerah melahirkan regulasi tambahan di tingkat lokal. Sub bab kedua berisikan pembahasan kebijakan pemerintah Bojonegoro dalam menarik investasi asing sektor non migas. BAB IV adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, serta mencantumkan daftar pustaka yang digunakan sebagai literature dalam skripsi ini.

